

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stakeholder

Teori stakeholder merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak lepas dari peranan *stakeholder* dengan berbagai kepentingan yang berbeda (Ladyve, Ask, & Mawardi, 2020). Menurut pendapat Rokhlinasari (2015) *stakeholder* adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder* dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder :

1. *Stakeholder* primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk *going concern*, meliputi: *shareholder* dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok *stakeholder* publik, yaitu : pemerintah dan komunitas.
2. Kelompok *stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya.

Semua perusahaan dituntut untuk selalu menjamin dan menghargai hak dan kepentingan berbagai pihak, jadi perusahaan bukan hanya entitas yang beroperasi untuk memenuhi kepentingannya sendiri, namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*. Hubungan stakeholder dan perusahaan adalah saling bergantung. *Stakeholder* membutuhkan perusahaan dan begitu sebaliknya. *Stakeholder*

membutuhkan perusahaan untuk memenuhi kepentingannya, sementara perusahaan membutuhkan *stakeholder* untuk mencapai keberhasilan dan menjaga kontinuitas perusahaannya (Meiyana, 2018).

Suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder*, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Teori *stakeholder* ini lebih mempertimbangkan posisi para *stakeholder* yang dianggap *powerfull*. Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan (Ladyve, Ask, & Mawardi, 2020).

Kesimpulannya keberlangsungan perusahaan tidak lepas dari peranan *stakeholder* yang memiliki kepentingan berbeda. Perusahaan dituntut untuk menjamin dan menghargai hak dan kepentingan berbagai pihak. Dengan demikian aktivitas suatu perusahaan bukan untuk kepentingannya sendiri namun juga harus memberi manfaat bagi *stakeholder*.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa organisasi beroperasi secara kontinu sesuai dengan batas nilai yang diterima oleh masyarakat di sekitar perusahaan untuk mendapatkan legitimasi. Berdasarkan teori ini, perusahaan dapat beroperasi dengan izin masyarakat dimana izin tersebut tidak bersifat tetap sehingga perusahaan harus beradaptasi dengan tuntutan dan keinginan masyarakat. Cara atau media yang efektif dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan pengungkapan *sustainability report* yang memaparkan tanggung jawab lingkungan

dan sosial perusahaan. Teori ini memberikan pandangan terhadap pengungkapan informasi sosial baik positif maupun negatif (Adhipradana & Daljono, 2014).

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori legitimasi ini menempatkan persepsi dan pengakuan publik sebagai dorongan utama dalam melakukan pengungkapan suatu informasi di dalam laporan keuangan (Rokhlinasari, 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Teori ini menggambarkan dengan adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga perusahaan akan mendapat nilai positif dari stakeholder yang juga akan mempengaruhi kinerja keuangannya.

2.1.3 Corporate Social Responsibility

2.1.3.1 Pengertian CSR

Menurut Nugroho & Yulianto (2015) *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan aktivitas tanggung jawab perusahaan terhadap para *stakeholder* dengan cara memberi perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan. Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan yang positif, dimana fokus perusahaan tidak hanya laba semata, namun juga pada aspek lingkungan dan sosial sekitarnya. Begitu pula

menurut Utami & Prastiti (2012) Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu komitmen manajemen untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam kinerja sosial. Dengan demikian, manajemen bertujuan mendapatkan penilaian positif dari pemilik modal

Pentingnya CSR juga disadari oleh pemerintah, terbukti dengan diaturnya kewajiban mengenai pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas CSR dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal tersebut mengatur tentang kewajiban perusahaan dalam melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder dengan cara memperhatikan aspek sosial lingkungan merupakan suatu komitmen perusahaan yang wajib dilakukan. Dengan diberlakukannya UU RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perusahaan diwajibkan :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada prinsipnya tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan agar perusahaan dapat memberi kontribusi untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. CSR berkaitan dengan *Sustainability* dan *Acceptability* yang artinya diterima dan berkelanjutan untuk berusaha di suatu tempat dan perusahaan ingin mempunyai keberlanjutan dalam jangka panjang. CSR merupakan elemen prinsip dalam tata laksana kemasyarakatan yang bukan hanya bertujuan memberi nilai tambah bagi para pemegang saham. Dengan demikian CSR tidak hanya mencangkup apa yang seharusnya dilakukan, tapi juga melihat apa yang sebaiknya dijalankan (Amini, 2018).

Manfaat yang muncul akibat melakukan program CSR secara rutin dan berkesinambungan ialah (Amini, 2018) :

1. Menciptakan Pemberdayaan Masyarakat Istilah pemberdayaan (*empowerment*) berarti kemampuan, tenaga, dan kekuasaan, dengan demikian. Pemberdayaan berarti membantu komunitas dengan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas komunitas sehingga berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga komunitas.
2. Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Program CSR merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi resiko sosial serta sarana untuk meningkatkan citra di mata publik. Salah satu implementasi program CSR adalah dengan kegiatan pengembangan masyarakat. Kegiatan yang menyangkut upaya baik langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk pengembangan sumber daya manusia, perbaikan kualitas hidup, penyembuhan

dan pencegahan masalah sosial yang dianggap sebagai pencipta kesejahteraan masyarakat.

3. Menciptakan Kemandirian Masyarakat Kemandirian masyarakat merupakan aspek terpenting dalam komunikasi pembangunan. Kemandirian adalah kemampuan untuk menghadapi masalah dan bertanggung jawab atas dirinya tanpa merugikan orang lain.

2.1.3.2 Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Praktek pengungkapan tanggung jawab sosial diatur dalam UU dalam Undang-Undang Perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Bab V Pasal 74 Tentang Pelaksanaan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Seperti yang dikutip dalam UU nomor 40 tahun 2007 yakni (www.ojk.go.id, diakses tanggal 20 Januari 2020) :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal juga mengatur kewajiban pelaksanaan CSR, pasal 15 bagian b, pasal 17, dan pasal 34 menerangkan bahwa penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial

perusahaan. Dengan demikian akan memberikan penekanan terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan tentu tidak sama dengan perusahaan lainnya. Terdapat beberapa jenis indikator yang sering digunakan untuk menilai pengungkapan CSR antara lain ISO 26000, Proper dan GRI (An Nisaa', 2015).

2.1.3.3 Prinsip CSR

Menurut Aini (2015) terdapat tiga prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (Triple Corporate Social Responsibility)*, prinsip ini harus menjadi pemahaman secara menyeluruh dalam pengaplikasian program *Corporate Social Responsibility*, yaitu :

1. *Profit* (keuntungan)

Profit merupakan unsur penting yang menjadi tujuan dari kegiatan usaha yang dapat digunakan untuk menjamin keberlangsungan hidup perusahaan. Melakukan efisiensi biaya dan meningkatkan produktivitas dapat mendongkrak profit perusahaan. Peningkatan produktivitas dapat diperoleh dengan memperbaiki kinerja manajemen, mengurangi aktivitas yang tidak efisien, dan menghemat waktu proses dan pelayanan

2. *People* (masyarakat)

Masyarakat sekitar perusahaan merupakan *stakeholder* yang memiliki peran penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, keberlangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan.

3. *Planet* (lingkungan)

Lingkungan adalah suatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan. Lingkungan memiliki hubungan sebab akibat dimana jika kita merawat lingkungan maka lingkungan akan memberi manfaat bagi. Dengan melestarikan, para pelaku industri akan memperoleh keuntungan yang lebih terutama dari sisi Kesehatan, kenyamanan, disamping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin keberlangsungannya.

2.1.3.4 Penilaian CSR

1. GRI (*global reporting Initiative*)

GRI adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia. Standar GRI mewakili praktik terbaik secara global dalam hal pelaporan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial kepada publik. Pelaporan keberlanjutan yang berdasarkan pada Standar GRI memberikan informasi tentang kontribusi positif atau negatif organisasi bagi pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan mekanisme akuntabilitas pertama untuk memastikan perusahaan mematuhi prinsip-prinsip perilaku lingkungan yang bertanggung jawab, yang kemudian diperluas untuk mencakup isu-isu sosial, ekonomi dan tata kelola (<http://www.globalreporting.org>). Pedoman GRI telah melalui berbagai pengembangan yaitu:

- a. Pedoman GRI (G1) versi pertama diterbitkan pada tahun 2000 menyediakan kerangka kerja global pertama untuk pelaporan keberlanjutan.

- b. Pada tahun 2002, GRI melakukan pembaruan pertama untuk pedoman GRI yaitu dengan diluncurkan GRI G2 sebagai lembaga independen non-*profit*. Pada tahun 2006 GRI melakukan pembaruan kembali dengan meluncurkan
- c. GRI G3 dengan menggunakan 6 indikator dengan 79 item total pengungkapan.
- d. Pada tahun 2013 GRI menerbitkan pembaruan dari GRI G3 menjadi GRI G4. Pembaruan ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan dengan menyajikan informasi penting terkait isu-isu organisasi yang paling kritis. Pada GRI G4 ini menggunakan 3 indikator utama dengan total 91 item pengungkapan.

2. ISO 26000 (*International Organization for Standardization*)

Menurut An Nisaa' (2015) ISO 26000 - *Guidance on social responsibility* (panduan tanggung jawab sosial) adalah suatu standar yang memuat panduan perilaku organisasi dalam pertanggungjawaban sosial guna kontribusi terhadap pembangunan secara berkelanjutan. Pada 1 November tahun 2010 *International Organization for Standardization* (ISO) mengeluarkan pedoman yang terdiri dari 6 bab serta memuat 7 prinsip, 2 praktik dasar, 7 subjek inti, 36 isu, dan 6 praktik integrasi tanggung jawab sosial organisasi. ISO 26000 merupakan tanggapan ISO terhadap semakin maraknya perhatian dunia terhadap isu tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility, CSR*). Menurut An Nisaa' (2015) terdapat tujuh subjek inti yang dibahas dalam ISO 26000 :

1. Tata Kelola organisasi (*organizational governance*): sistem pengambilan dan penerapan keputusan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuannya.

2. Hak asasi manusia (*human rights*): hak dasar yang berhak dimiliki semua orang sebagai manusia, yang antara lain mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Praktik ketenagakerjaan (*labour practices*): segala kebijakan dan praktik yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan di dalam atau atas nama perusahaan.
4. Lingkungan (*the environment*): dampak keputusan dan kegiatan perusahaan terhadap lingkungan.
5. Prosedur operasi yang wajar (*fair operating procedures*): perilaku etis organisasi saat berhubungan dengan organisasi dan individu lain.
6. Isu konsumen (*consumer issues*): tanggung jawab perusahaan penyedia barang/jasa terhadap konsumen dan pelanggannya.
7. Pelibatan dan pengembangan masyarakat (*community involvement and development*): hubungan organisasi dengan masyarakat di sekitar wilayah operasinya.

Pengukuran terhadap ISO 26000 dilakukan dengan penilaian terhadap item-item yang diungkapkan oleh perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan ini apakah sudah sesuai dengan prinsip atau subjek yang terdapat pada ISO 26000.

2.1.4 Kinerja Lingkungan

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan merupakan kinerja suatu perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan mampu menurunkan dampak lingkungan hingga mencapai bawah baku mutu seperti yang telah dipersyaratkan oleh peraturan yang terkait Pengelolaan kinerja lingkungan ini sebagai upaya perusahaan dalam mencegah pencemaran lingkungan, dengan dilakukannya pengelolaan kinerja lingkungan ini perusahaan diharapkan dapat menjaga keseimbangan lingkungan dalam setiap aktivitas agar tercapainya kinerja unggul (Tjahjono, 2013).

Kinerja lingkungan akan menggambarkan bagaimana kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Jika lingkungan dan sumber daya di sekitar perusahaan sudah terjaga dengan baik, maka bisa dipastikan bahwa kinerja lingkungan perusahaan akan baik pula. Kinerja lingkungan perusahaan perlu dijaga agar selalu baik. Hal ini untuk menghindari tuntutan dari masyarakat maupun *stakeholder*, sehingga keberlanjutan perusahaan akan tetap berlangsung (Meiyana).

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang RI No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 67, “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup” Pasal 68, “setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan wajib : (a) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu, (b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan (c) menaati tentang ketentuan baku kerusakan lingkungan hidup”. Dalam undang- undang tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatannya wajib untuk menjaga dan memelihara kelangsungan lingkungan hidup.

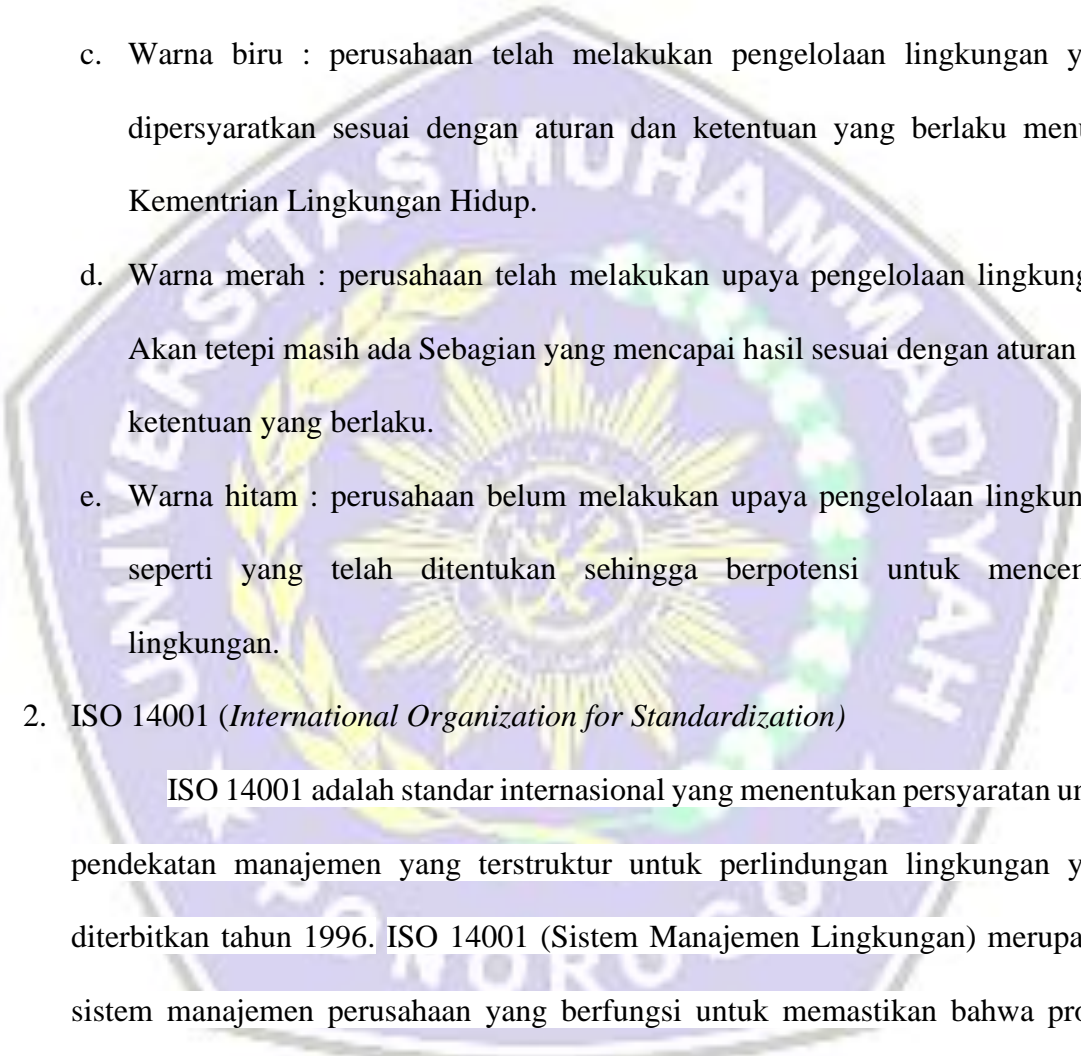
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja lingkungan merupakan suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menekan dampak lingkungan yang terjadi hingga mencapai batas baku mutu. Jika lingkungan dan sumber daya dapat terjaga dengan baik maka menandakan bahwa kinerja lingkungan perusahaan baik pula.

2.1.4.2 Penilaian Kinerja Lingkungan

Menurut Setiawan, Budi, & Pranaditya (2018) ada beberapa indikator untuk mengukur kinerja lingkungan suatu perusahaan seperti PROPER, ISO (*International Organization for Standardization*). Kinerja lingkungan dalam penelitian ini diukur menggunakan Proper.

1. PROPER

Menurut Fitriani (2013) Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan instrumen yang digunakan oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup (KLH) yang diterbitkan tahun 1995. Proper digunakan untuk mengukur tingkat ketaatan perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan ini digunakan untuk mengukur usaha perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Proper diumumkan secara rutin setiap tahunnya sehingga perusahaan dinilai akan memperoleh insentif maupun disinsentif reputasi, tergantung kepada tingkat ketaatan. Di dalam proper terdapat lima peringkat warna yang memiliki arti berbeda-beda yaitu :

- 
- a. Warna emas : perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan melakukan upaya dalam pengembangan lingkungan dan masyarakat secara berkesinambungan.
 - b. Warna hijau : perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan.
 - c. Warna biru : perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku menurut Kementerian Lingkungan Hidup.
 - d. Warna merah : perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan. Akan tetapi masih ada Sebagian yang mencapai hasil sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Warna hitam : perusahaan belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan seperti yang telah ditentukan sehingga berpotensi untuk mencemari lingkungan.

2. ISO 14001 (*International Organization for Standardization*)

ISO 14001 adalah standar internasional yang menentukan persyaratan untuk pendekatan manajemen yang terstruktur untuk perlindungan lingkungan yang diterbitkan tahun 1996. ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) merupakan sistem manajemen perusahaan yang berfungsi untuk memastikan bahwa proses yang digunakan dan produk yang dihasilkan telah memenuhi komitmen terhadap lingkungan, terutama dalam upaya pemenuhan terhadap peraturan di bidang lingkungan, pencegahan pencemaran dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Tujuan ISO 14001 adalah untuk memungkinkan organisasi dari semua jenis atau ukuran untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang

berkomitmen untuk bertanggung jawab pada lingkungan; seperti keberlanjutan sumber daya, pencegahan polusi, mitigasi perubahan iklim dan minimalisasi dampak lingkungan (www.isoindonesiacenter.com). Manfaat Mendapatkan Sertifikat ISO 14001 adalah:

1. Meminimasi potensi konflik antara pekerja dengan pengusaha dalam penyediaan lingkungan kerja yang layak dan sehat dan meningkatkan produktivitas pekerja melalui efisiensi waktu dan biaya.
 2. Menjembatani pemenuhan peraturan lingkungan dengan lebih terencana dan terstruktur.
 3. Penggunaan sumber daya alam yang lebih bijaksana menuju terciptanya eko-efisiensi.
 4. Menjaga citra bisnis industri yang selama ini sering dikaitkan secara negatif dengan pencemaran lingkungan
 5. Berkurangnya pencemaran lingkungan melalui penurunan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya.
 6. Pengurangan limbah berbahaya dan dapat mengurangi gangguan sosial yang berasal dari keberadaan industri itu sendiri misalnya, mengurangi kebisingan, polusi air, polusi udara, kemacetan, dan social responsibility.
3. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1999 yang menjelaskan mengenai amdal. Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting bagi suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut maka AMDAL merupakan syarat yang harus

dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu AMDAL harus disusun segera setelah jelas alternatif lokasi usaha dan/atau kegiatannya serta alternatif teknologi yang akan digunakan.

Pemrakarsa diwajibkan untuk mengumumkan terlebih dulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun AMDAL yaitu pelaksanaan Kepka Bapedal No. 8 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam proses AMDAL. Dalam jangka waktu 30 hari sejak diumumkan, masyarakat berhak memberikan saran, pendapat, dan tanggapan. Dalam proses pembuatan AMDAL, maka peran masyarakat tetap diperlukan, untuk memberikan pertimbangan, saran, pendapat dan tanggapan dalam pelaksanaan studi AMDAL. Pada proses penilaian AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL maka saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat akan menjadi dasar pertimbangan penetapan kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Dokumen AMDAL terdiri dari 5 (lima) rangkaian dokumen yang dilaksanakan secara berurutan, yaitu :

1. Konsultasi Masyarakat sebagai implementasi Kepka Bapedal No.8/2000
2. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL)
3. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
4. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
5. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

2.1.5 Biaya Lingkungan

2.1.5.1 Pengertian

Biaya lingkungan merupakan pendekatan akuntansi biaya sistematis dan tidak hanya fokus pada biaya lingkungan namun juga perlu mempertimbangkan biaya lingkungan terhadap material dan energi. Biaya lingkungan ini menunjukkan biaya riil atas input dan proses bisnis serta memastikan adanya efisiensi biaya dan diaplikasikan untuk mengukur biaya kualitas dan jasa (Setiawan, Budi, & Pranaditya, 2018). Menurut Hansen dan Mowen (2009) biaya lingkungan adalah biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk yang mungkin terjadi yang timbul akibat aktivitas perusahaan. Perlu adanya pemusatan biaya oleh perusahaan terhadap biaya lingkungan sehingga biaya lingkungan yang dikeluarkan dapat tergambarkan dengan jelas. Alokasi biaya lingkungan yang jelas menggambarkan konsistensi kepedulian perusahaan terhadap lingkungan (Tunggal & Fachrurrozie, 2014).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa biaya lingkungan merupakan biaya timbul akibat kualitas lingkungan yang buruk akibat aktivitas perusahaan. Biaya ini menunjukkan biaya *riil* atas proses bisnis dan diaplikasikan untuk mengukur biaya kualitas dan jasa. Dalam penelitian ini biaya lingkungan diprosikan menggunakan literatur dari Hansen & Mowen menggunakan rasio biaya lingkungan.

2.1.5.2 Pembebanan dan Tujuan Biaya Lingkungan

Menurut Hansen dan Mowen (2005) ada dua macam pembebanan biaya lingkungan, diantaranya :

1. Pembebanan biaya lingkungan berbasis fungsi

Dengan menggunakan definisi biaya lingkungan dan kerangka kerja klasifikasi yang baru dikembangkan, biaya lingkungan harus dipisahkan ke

dalam kelompok biaya lingkungan dan tidak lagi disembunyikan di dalam overhead seperti halnya dalam kebanyakan sistem akuntansi. Dalam perhitungan biaya berbasis fungsi dibentuk suatu kelompok biaya lingkungan dan tingkat atau tarifnya dihitung dengan menggunakan penggerak tingkat unit seperti jumlah jam tenaga kerja dan jam mesin. Biaya lingkungan kemudian dibebankan kepada setiap produk berdasarkan pemakaian jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Pendekatan ini tidak berjalan dengan baik untuk produk yang homogen. Namun, dalam perusahaan yang memiliki banyak produk yang bervariasi, pembebanan biaya semacam ini mengakibatkan distorsi biaya.

2. Pembebanan biaya lingkungan berbasis aktivitas

Munculnya perhitungan biaya berbasis aktivitas ikut memfasilitasi perhitungan biaya lingkungan. Untuk perusahaan yang menghasilkan beragam produk, pendekatan berbasis aktivitas lebih tepat. Untuk aktivitas-aktivitas lingkungan ganda, setiap aktivitas akan dibebankan pada biaya, dan tingkat aktivitas akan dihitung. Tingkat ini kemudian digunakan untuk membebankan biaya lingkungan ke produk berdasarkan penggunaan aktivitas. Penelusuran biaya lingkungan ke produk-produk yang menyebabkan biaya-biaya tersebut merupakan syarat utama dari sistem akuntansi lingkungan yang baik.

Menurut Hansen dan Mowen (2009) tujuan biaya lingkungan adalah :

- a. Meminimalkan penggunaan bahan baku
- b. Meminimalkan penggunaan barang berbahaya
- c. Meminimalkan kebutuhan energi untuk produksi dan penggunaan produk
- d. Meminimalkan pelepasan residu padat, cair dan gas

2.1.5.3 Klasifikasi Biaya Lingkungan

Menurut Hansen dan Mowen (2009) biaya lingkungan diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu :

- a. Biaya pencegahan lingkungan adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksi limbah dan atau sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
- b. Biaya deteksi lingkungan adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan dalam menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak.
- c. Biaya kegagalan internal lingkungan adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksi limbah atau sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar.

Tujuan dari aktivitas kegagalan internal adalah :

1. Untuk memastikan bahwa limbah dan sampah yang diproduksi tidak dibuang ke lingkungan luar.
 2. Untuk mengurangi tingkat limbah yang dibuang sehingga jumlahnya tidak melewati standar lingkungan.
- d. Biaya kegagalan eksternal lingkungan adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan internal dibagi menjadi dua yaitu :
 1. Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi adalah biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan.

2. Biaya kegagalan eksternal yang tidak terealisasi atau biaya sosial yaitu disebabkan oleh perusahaan tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak diluar perusahaan

2.1.5.4 Pengukuran Biaya Lingkungan

Menurut Meilanawati (2013) Biaya lingkungan merupakan salah satu komponen dalam item yang dapat diungkapkan dalam pelaporan informasi sosial perusahaan. Bentuk pengungkapan dalam laporan keuangan disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, baik berdasarkan PSAK No. 1 Tahun 2015 maupun PP No. 71 Tahun 2010. Namun, belum ada bentuk pengungkapan mengenai biaya lingkungan di dalam Standar Akuntansi Keuangan maupun Standar Akuntansi Pemerintahan. Di Indonesia, masih sedikit perusahaan yang secara sukarela telah mengungkapkan biaya lingkungannya. Pengungkapan secara sukarela ini dikarenakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang belum mewajibkan setiap perusahaan menufaktur untuk mengungkapkan informasi tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan termasuk biaya-biayanya. Selain itu pengungkapan informasi sosial ini dipengaruhi oleh kategori industri perusahaan, yaitu high profile dan low profile. Perusahaan high profile yang memiliki visibilitas konsumen akan cenderung untuk lebih mengungkapkan biaya-biaya lingkungan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan low profile

Menurut Meilanawati (2013) biaya lingkungan dalam laporan keuangan perusahaan disajikan dalam bentuk sederhana sebagai beban usaha dalam komponen beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi. Beban umum dan administrasi artinya adalah biaya-biaya yang digunakan dalam kantor administrasi

perusahaan serta biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan guna kepentingan kelancaran jalannya perusahaan secara keseluruhan.

Penyajian ini berpedoman pada PSAK No. 1 tahun 2009 yang menyebutkan :

“Entitas perusahaan dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”

2.1.6 Ukuran Perusahaan

2.1.6.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor dimana semakin besar suatu perusahaan maka semakin dikenal oleh masyarakat yang artinya akan semakin mudah untuk mendapatkan informasi. Suatu perusahaan yang memiliki aset yang besar akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut (Prasetyorini, 2013). Ukuran perusahaan merupakan suatu perbandingan untuk menilai besar kecilnya suatu perusahaan (Setiawan, Budi, & Pranaditya, 2018). Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat dinilai dari total aset yang dimiliki, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata aset (Sholekah & Venusita, 2014).

Skala ukuran perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dari perusahaan kecil. Ini dikarenakan perusahaan besar akan

menghadapi resiko politis yang besar dibandingkan perusahaan kecil. Tekanan politis ini yaitu tekan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial sehingga perusahaan besar cenderung mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial yang lebih besar (Sari & Rani, 2015).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu perbandingan untuk menilai besar kecilnya perusahaan. Dimana semakin besar ukuran suatu perusahaan maka aset yang dimiliki juga semakin besar dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya.

2.1.6.2 Faktor-Faktor Yang Digunakan Untuk Menentukan Ukuran Perusahaan

Besar kecilnya perusahaan dapat diukur menggunakan skala :

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.
3. Total utang, merupakan jumlah utang perusahaan pada periode tertentu.
4. Total assets, merupakan keseluruhan assets yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

2.1.6.3 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 pasal 6 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan tahunan
Usaha Mikro	Maksiman 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	> 300 juta -2,5 M
Usaha Menengah	> 500 juta – 10 M	2,5 M – 10 M
Usaha Besar	>10 M	> 50 M

Sumber : UU No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah

2.1.6.4 Indikator Ukuran Perusahaan

Adapun indikator ukuran perusahaan menurut Niresh (2014) diukur dengan menggunakan dua rumus yaitu :

1. Total aset (Ln Total aset)

Aset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki, perusahaan dapat melakukan investasi dengan baik dan memenuhi permintaan produk. Hal ini semakin memperluas pangsa pasar yang dicapai dan akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

2. Total penjualan (Ln Total penjualan)

Penjualan adalah fungsi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba. Penjualan yang terus meningkat dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Hal ini laba perusahaan akan meningkat yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

2.1.7 Kinerja Keuangan

2.1.7.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Gulo & Ernawati (2011) Kinerja keuangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh berbagai unsur perusahaan sebagai proses untuk mencapai tujuan yang dilihat dari tingkat produktivitas, efektifitas, dan efisiensi. Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai perusahaan dan menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen serta mampu menciptakan nilai perusahaan itu sendiri kepada para stakeholder.

Menurut Pertiwi & Pratama (2012) kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Efektivitas apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi diartikan sebagai ratio (perbandingan) antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai proses untuk mencapai tujuan yang

dilihat dari tingkat produktivitas, efektifitas, dan efisiensi. Pengukuran kinerja keuangan ini dilakukan setiap periode untuk menilai kemajuan yang dicapai perusahaan.

Pengukuran kinerja keuangan mempunyai beberapa tujuan diantaranya (Palumpung, 2015) :

- a. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih.
- b. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
- c. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan aset atau ekuitas secara produktif.
- d. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap stabil, yang diukur dari kemampuan perusahaan dalam membayar pokok utang dan beban bunga tepat waktu, serta pembayaran dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami kesulitan atau krisis uang.

2.1.7.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Herry (2015) pengukuran kinerja keuangan dapat diukur menggunakan konsep akuntansi konvensional. Rasio yang sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu analisis rasio (rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas), analisis nilai tambah (*Marker Value Added* dan *Economic Value Added*). Menurut Herry (2015) analisis rasio yaitu :

1. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Jenis-jenis rasio likuiditas yaitu :

a. *Current ratio*

Current ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo menggunakan total aset lancar yang tersedia. Menurut Herry (2015) rumus untuk mengukur *Current ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilitas}}$$

Keterangan :

Current ratio : Rasio Lancar

Current Assets : Aktiva Lancar

Current Liabilities : Hutang Lancar

b. *Quick ratio*

Quick ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan assets lancar (kas, sekuritas, piutang), tidak termasuk persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya. Menurut Herry (2015) rumus untuk mengukur *Quick ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{Quick ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilitas}}$$

Keterangan :

Quick ratio : Rasio Cepat

Current Assets : Aktiva Lancar

Inventory : Persediaan

Current Liabilities : Hutang Lancar

c. *Cash ratio*

Cash ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan yang sesungguhnya dalam melunasi kewajibannya yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan uang kas atau kas yang ada.

Menurut Herry (2015) rumus untuk mengukur *Cash ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Cash}}{\text{Current Liabilitas}}$$

Keterangan :

Cash Ratio : Rasio Lancar

Cash : Kas

Current Liabilities : Kewajiban Lancar

2. Rasio solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Menurut Herry (2015) Jenis-jenis rasio solvabilitas yaitu:

a. *Debt to Assets Ratio*

Debt to Assets Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total assets. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar assets perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan assets. Menurut Herry (2015) rumus yang digunakan untuk mengukur debt to assets ratio adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total assets}}$$

Keterangan :

Debt Ratio : Rasio Utang

Total Debt : Total Hutang

Total Assets : Total Aktiva

b. *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. rasio ini mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditur dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan.

Menurut Herry (2015) rumus yang digunakan untuk mengukur *debt to equity ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total equity}}$$

Keterangan :

Debt to Equity Ratio : Rasio Utang terhadap modal

Total Debt : Total Hutang

Total Equity : Total Aktiva

c. *Long Term Debt to Equity Ratio*

Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditur jangka panjang dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Menurut Herry (2015) rumus yang digunakan untuk mengukur long term debt to equity ratio adalah sebagai berikut :

$$\text{Long term debt to equity ratio} = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Total equity}}$$

Keterangan :

Long term debt to equity ratio : Rasio utang jangka panjang terhadap modal

Long term debt : Utang jangka panjang

Total equity : Total modal

d. *Times Interest Earned Ratio*

Times interest earned ratio merupakan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan perusahaan disini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak. Menurut Herry

(2015) rumus yang digunakan untuk mengukur times interest earned ratio adalah sebagai berikut :

$$\text{Times interest earned ratio} = \frac{EBIT}{\text{Interest expense}}$$

Keterangan :

Times interest earned ratio : Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan

EBIT : Laba sebelum bunga dan pajak

Interest expense : Beban bunga

e. *Operating Income to Liabilities Ratio*

Operating Income to liabilities ratio merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan melunasi seluruh kewajiban. Kemampuan perusahaan disini diukur dari jumlah laba operasional. Menurut Herry (2015) rumus yang digunakan untuk mengukur operating Income to liabilities ratio adalah sebagai berikut

:

$$\text{Operating Income to liabilities} = \frac{\text{Operational Profit}}{\text{Obligation}}$$

Keterangan :

Operating Income to liabilities ratio : Rasio laba operasional terhadap

kewajiban Operating

Profit : Laba operasional

Obligation : Kewajiban

3. Rasio aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan assets yang dimilikinya, termasuk untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada. Jenis-jenis rasio aktivitas yaitu :

a. *Accounts Receivable Turnover*

Accounts receivable turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam piutang usaha akan berputar dalam satu periode atau berapa lama (dalam hari) rata-rata penagihan piutang usaha. Menurut Herry (2015) rumus yang digunakan untuk mengukur *accounts receivable turnover* adalah sebagai berikut :

$$\text{Accounts receivable turnover} = \frac{\text{Credit sales}}{\text{Average trade receivables}}$$

Keterangan :

Accounts receivable turn over : Rasio perputaran piutang usaha C

Credit sales : Penjualan kredit

Average trade receivables : Rata-rata piutang usaha

b. *Inventory Turn Over*

Inventory turn over merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan akan berputar dalam satu periode atau berapa lama (dalam hari) rata-rata persediaan tersimpan digudang hingga akhirnya dijual. Menurut Herry (2015) rumus yang digunakan untuk mengukur *inventory turn over* adalah sebagai berikut :

$$\text{Inventory turnover} = \frac{\text{Sales}}{\text{Average inventory}}$$

Keterangan :

Inventory turn over : Perputaran persediaan

Sales : Penjualan

Average inventory : Rata-rata persediaan

c. *Working Capital Turnover*

Working capital turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan modal kerja (aset lancar) yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara besarnya jumlah penjualan (tunai maupun kredit) dengan rata-rata lancar. Menurut Herry (2015) rumus yang digunakan untuk mengukur *working capital turnover* adalah sebagai berikut :

$$\text{Working capital turnover} = \frac{\text{Sales}}{\text{Average current assets}}$$

Keterangan :

Working capital turnover : Perputaran modal kerja

Sales : Penjualan

Average current assets : Rata-rata aset lancar

d. *Fixed Assets Turnover*

Fixed assets turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan atau untuk mengukur seberapa efektif kapasitas

aset tetap turut berkontribusi menciptakan penjualan. Menurut Herry (2015) rumus yang digunakan untuk mengukur *fixed assets turnover* adalah sebagai berikut :

$$\text{Fixed assets turnover} = \frac{\text{Sales}}{\text{Average fixed assets}}$$

Keterangan :

Fixed assets turnover : Rasio perputaran aset tetap

Sales : Penjualan

Average fixed assets : Rata-rata aset tetap

e. *Total Assets Turnover*

Total assets turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan total aset yang dimiliki perusahaan dalam perusahaan dalam menghasilkan penjualan atau untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Menurut Herry (2015) rumus yang digunakan untuk mengukur *total assets turnover* adalah sebagai berikut :

$$\text{Total assets turnover} = \frac{\text{Sales}}{\text{Average total assets}}$$

Keterangan :

Total assets turnover : Rasio perputaran total aset

Sales : Penjualan

Average total assets : Rata-rata total asse

4. Rasio Profitabilitas

Menurut Herry (2015) profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Jenis-jenis rasio profitabilitas yaitu :

a. *Return on Assets (ROA)*

Return on assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Menurut Herry (2015) rumus yang digunakan untuk mengukur *return on assets* adalah sebagai berikut :

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Earning after taxes}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan :

Return on Assets (ROA) : Pengembalian aset

Earning After Taxes : Laba bersih sesudah pajak

Total Assets : Total Aktiva

b. *Return on Equity (ROE)*

Return on equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Menurut Herry (2015)

rumus yang digunakan untuk mengukur *return on equity* adalah sebagai berikut :

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Earning after taxes}}{\text{Total Equity}}$$

Keterangan :

Return on Equity (ROE) : Pengembalian ekuitas

Earning After Taxes : Laba bersih sesudah pajak

Total Equity : Total modal

c. *Gross Profit Margin*

Gross profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Menurut Herry (2015) rumus yang digunakan untuk mengukur *gross profit margin* adalah sebagai berikut :

$$\text{Gross profit margin} = \frac{\text{Gross profit}}{\text{Net sales}}$$

Keterangan :

Gross profit margin : Marjin laba kotor

Gross profit : Laba kotor

Net sales : Penjualan bersih

d. *Operating Profit Margin*

Operating profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Menurut Herry (2015) rumus yang digunakan untuk mengukur *operating profit margin* adalah sebagai berikut :

$$\textit{Operating profit margin} = \frac{\textit{Operating profit}}{\textit{Net sales}}$$

Keterangan :

Operating profit margin : Marjin laba operasional

Operating profit : Laba operasional

Net sales : Penjualan bersih

e. *Net Profit Margin*

Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Menurut Herry (2015) rumus yang digunakan untuk mengukur *net profit margin* adalah sebagai berikut :

$$\textit{Net profit margin} = \frac{\textit{Net profit}}{\textit{Net sales}}$$

Keterangan :

Net profit margin : Marjin laba bersih

Net profit : Laba bersih

Net sales : Penjualan bersih

Menurut (Brigham, 2009) kinerja keuangan juga dapat diukur menggunakan *Value Added* (nilai tambah) yaitu:

1. Nilai tambah pasar (*Market Value Added- MVA*)

Menurut Brigham (2009) MVA yaitu perbedaan antara nilai pasar saham perusahaan dengan jumlah ekuitas modal investor yang telah diberikan oleh pemegang saham. Modal yang diinvestasikan adalah jumlah seluruh keuangan perusahaan, terlepas dari kewajiban jangka pendek, pasiva yang tidak menanggung bunga, seperti utang, upah yang akan jatuh tempo, dan pajak yang akan jatuh tempo. Menurut Sari & Wujayantini (2018) rumus MVA adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{MVA} &= \text{Nilai pasar dari saham} - \text{ekuitas yang diberikan pemegang saham} \\ &= (\text{saham beredar}) (\text{harga saham}) - \text{total ekuitas saham biasa} \end{aligned}$$

2. Nilai Tambah Ekonomi (*Economic Value Added-EVA*)

EVA merupakan pengukuran kinerja keuangan berdasarkan nilai yang merefleksikan jumlah absolut dari nilai kekayaan pemegang saham yang dihasilkan, baik bertambah maupun berkurang setiap tahunnya. EVA merupakan alat yang berguna untuk memilih investasi keuangan yang paling menjanjikan sekaligus sebagai alat yang cocok untuk mengendalikan operasi perusahaan dan mengukur kinerja keuangan secara tepat untuk kepentingan dan penyedia dana. Dengan konsep ini dapat diketahui biaya yang harus dikeluarkan berhubungan

dengan penggunaan modal usaha perusahaan (Gulo & Ernawati, 2011). Menurut Sari & Wujyantini (2018) rumus EVA adalah sebagai berikut:

$$EVA = NOPAT - Capital\ Chargers$$

Keterangan :

NOPAT (*Net Operating After Tax*) : Operasi bersih setelah pajak

Capital Chargers : Modal yang ditanamkan

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa peneliti terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam ini adalah sebagai berikut:



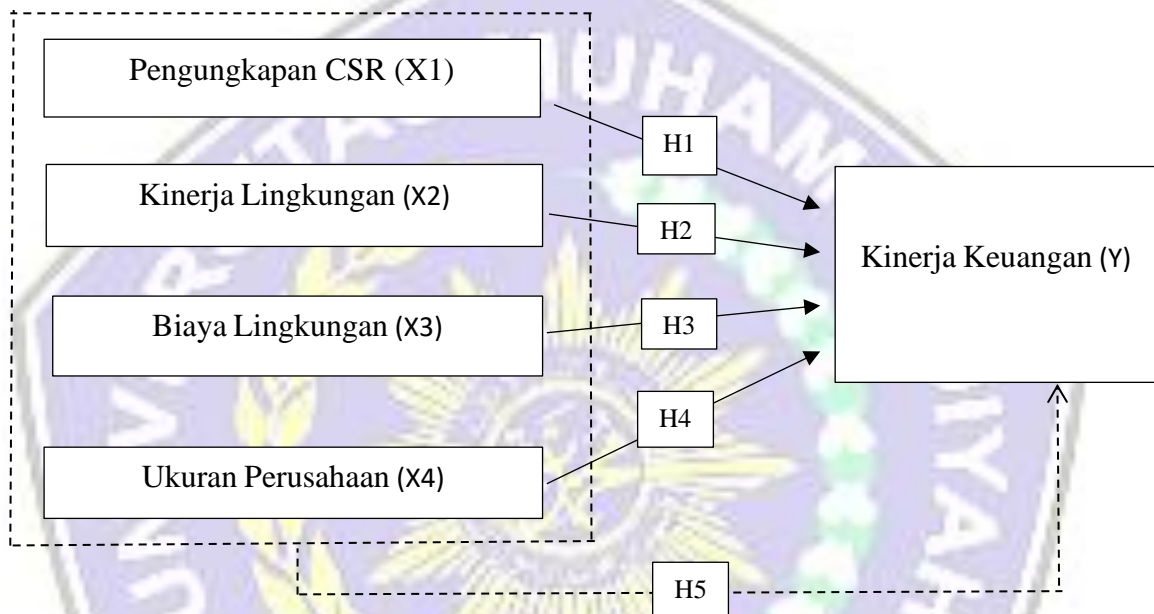
Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
1.	Ladyve, Ask, & Mawardi (2020)	Kinerja Lingkungan (X1), Biaya Lingkungan (X2), Ukuran Perusahaan (X3), Kinerja Keuangan (Y)	Kinerja lingkungan, biaya lingkungan dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
2.	Rosyid (2015)	Kinerja Sosial (X1), Kinerja Lingkungan (X2), Kinerja Keuangan (Y)	Kinerja lingkungan dan kinerja sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
3.	Astuti, Anisykurlillah & Murtini (2014)	Kinerja Lingkungan (X1), Kepemilikan Asing (X2), Kinerja Keuangan (Y)	Kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
4.	Tunggal & Fachrurrozie (2014)	Environmental Performance (X1), Environmental Cost (X2), CSR Disclosure (X3) Financial Performance (Y)	Environmental Performance berpengaruh terhadap Financial Performance. Sedangkan CSR disclosure tidak berpengaruh terhadap financial performance.
5.	Setiawan, Budi H, Pranaditya (2018)	Kinerja Lingkungan (X1), biaya Lingkungan (X2) Ukuran perusahaan (X3), Kinerja keuangan (Y1) Corporate social Responsibility (CSR) (Y2)	Kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap CSR. Sedangkan biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap CSR. Kinerja lingkungan, biaya lingkungan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Sumber : Data diolah, 2021

2.3 Kerangka Berpikir

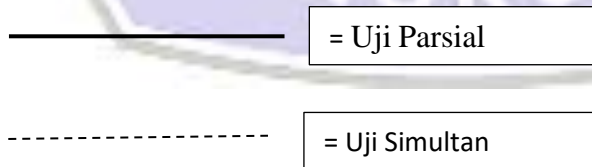
Dalam penelitian ini hanya berfokus pada 4 dari beberapa referensi yaitu pengungkapan CSR, kinerja lingkungan, biaya lingkungan, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Peneliti menduga bahwa keempat variabel tersebut mempengaruhi kinerja keuangan.



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

Keterangan



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan

Pengungkapan CSR akan mempengaruhi bagaimana kinerja keuangan suatu perusahaan, dimana perusahaan harus melakukan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Laporan keuangan memberikan informasi dari hasil kinerja suatu perusahaan apakah perusahaan tersebut lebih baik antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Oleh karena itu suatu perusahaan melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, dengan tujuan agar direspon dengan baik oleh masyarakat sehingga berpengaruh dengan meningkatnya nama baik perusahaan (Achmad & Rahmawati, 2012).

Penelitian terdahulu (Setiawan, Budi, & Pranaditya, 2018) menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan secara signifikan yang berarti bahwa jika CSR meningkat maka kinerja keuangan juga akan meningkat. Sejalan dengan penelitian Setiawan, Budi, & Pranaditya (2018), pada penelitian Fithri & Maryanti (2017) juga menunjukkan hasil bahwa CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan, ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan CSR akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan sehingga *image* perusahaan meningkat. Berdasarkan deskripsi tersebut maka hipotesis tersebut dirumuskan sebagai berikut :

H₀₁ : Pengungkapan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

H_{a1} : Pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

2.4.2 Pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan

Setiap perusahaan pasti berupaya agar menghasilkan memproses dan menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan perusahaan, karena ketika pasar yang akan dimasuki perusahaan semakin membesar maka perusahaan akan memiliki peluang meningkatkan penjualannya dan akan mempengaruhi kinerja keuangan yang semakin meningkat (Rosyid, 2015).

Pada penelitian (Ladyve, Ask, & Mawardi, 2020) menyatakan bahwa kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kinerja lingkungan atau meningkatkan kinerja lingkungan maka kinerja keuangan juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2013) menunjukkan bahwa semakin baik kinerja lingkungan maka akan direspons positif oleh investor melalui fluktuasi harga saham perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu konsumen atau masyarakat akan lebih tertarik untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan atas penanganan dampak yang dihasilkan perusahaan dan akan berpengaruh terhadap pendapatan dan laba yang merupakan indikator kinerja keuangan. Berdasarkan deskripsi tersebut maka hipotesis tersebut dirumuskan sebagai berikut :

H_{02} : Kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

H_{a2} : Kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

2.4.3 Pengaruh biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan

Lingkungan sekitar proses produksi merupakan yang paling berpotensi atas dampak dari perusahaan. Pengungkapan informasi lingkungan yang dilakukan perusahaan, akan menguatkan persepsi investor terkait kepedulian perusahaan dalam menjaga lingkungan. Pengungkapan keberhasilan lingkungan ini dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam mengalokasikan biaya lingkungan (Adyaksana, 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tunggal & Fachrurrozie (2014) menyatakan bahwa biaya lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sejalan dengan penelitian Tunggal & Fachrurrozie (2014), penelitian yang dilakukan Setiawan, Budi, & Pranaditya (2018) menyatakan bahwa biaya lingkungan juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan deskripsi tersebut maka hipotesis tersebut dirumuskan sebagai berikut :

H₀₃ : Biaya lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

H_{a3}: Biaya lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

2.4.4 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan

Ukuran perusahaan biasanya digunakan untuk menjelaskan pengungkapan informasi sosial oleh perusahaan dalam laporan tahunan yang akan dibuat. Umumnya perusahaan besar akan lebih banyak mengungkapkan informasinya dari pada perusahaan kecil. (Nasir, Kurnia, & Hakri, 2013). Suatu perusahaan yang memiliki aset yang besar biasanya akan mendapat perhatian dari stakeholder

sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangannya (Sukandar & Rahardja, 2014).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Setiawan, Budi, & Pranaditya, 2018) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sejalan dengan penelitian Setiawan, Budi, & Pranaditya (2018), penelitian yang dilakukan oleh Ladyve, Ask, & Mawardi (2020) yang menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan deskripsi tersebut maka hipotesis tersebut dirumuskan sebagai berikut :

H₀₄ : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

H_{a4} : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan

2.4.5 Pengaruh pengungkapan Corporate social responsibility, kinerja lingkungan, biaya lingkungan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan

Kinerja keuangan memiliki hubungan dengan pengungkapan CSR, kinerja lingkungan, biaya lingkungan dan ukuran perusahaan. Hal ini dikarenakan kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai atas keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan. Semakin besar ukuran perusahaan tentu akan mengungkap informasi lebih luas mengenai kinerja lingkungannya sehingga juga berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan perusahaan (Tunggal & Fachrurrozie, 2014). Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₀₅ : Pengungkapan *corporate social responsibility*, kinerja lingkungan, biaya lingkungan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

H_{a5} : Pengungkapan *corporate social responsibility*, kinerja lingkungan, biaya lingkungan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan

